

---

## LEMBAGA PETANI KELAPA SAWIT SEBAGAI WADAH PENGEMBANGAN DAN MODERNISASI SAWIT RAKYAT DI DESA KUTA JURUNG KECAMATAN STM HILIR, KABUPATEN DELI SERDANG

Jongkers Tampubolon<sup>1</sup>, Albina Ginting<sup>2</sup>, Hotden Leonardo Nainggolan<sup>3</sup>  
Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nommensen Medan  
[albinamunthe@gmail.com](mailto:albinamunthe@gmail.com)

### Abstrak

Kelembagaan petani memiliki fungsi sebagai wadah proses pembelajaran bagi petani, wahana kerja sama, penyedia sarana dan prasarana produksi, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran, serta unit jasa penunjang. Pengabdian ini bertujuan untuk; a) memberikan pemahaman bagi petani tentang manfaat kelembagaan kelompok tani sebagai wadah untuk mendapatkan modal atau pembiayaan untuk peremajaan kelapa sawit rakyat yang bersumber dari pemerintah; b) untuk memberikan pemahaman bagi petani dalam membentuk kelompok tani kelapa sawit rakyat, sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Berdasarkan kegiatan pengabdian disimpulkan; a) terjadi peningkatan jumlah petani partisipan yang memahami adanya program pemerintah tentang peremajaan kelapa sawit rakyat; b) terjadi peningkatan jumlah petani yang memahami bahwa pemerintah memberikan bantuan dana kepada petani untuk meremajakan dan mengembangkan usahatani kelapa sawitnya; c) terjadi peningkatan jumlah petani yang memahami bahwa pemerintah melalui BPDPKS dapat memberikan sarana produksi berupa pupuk bersubsidi bagi petani kelapa sawit rakyat ; d) terjadi peningkatan jumlah petani yang memahami bahwa keikutsertaan dalam kelembagaan koperasi atau kelompok tani merupakan persyaratan untuk mendapatkan bantuan pemerintah dalam mengembangkan usahatani kelapa sawitnya.

*Kata Kunci : Petani, Kelapa Sawit, Kelembagaan, Kelompok Tani*

### Abstract

*Farmer institutions have a function as a forum for the learning process for farmers, a vehicle for cooperation, providers of production facilities and infrastructure, production units, processing and marketing units, and supporting service units. This service activity aims to; a) provide understanding for farmers about the benefits of farmer group institutions as a forum for obtaining capital or financing for smallholder oil palm rejuvenation sourced from the government; b) to provide understanding for farmers in forming smallholder oil palm farmer groups, as a condition for obtaining assistance from the Palm Oil Plantation Fund Management Agency (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit/BPDPKS). Based on service activities; a) an increase in the number of farmers who understand the existence of a government program on smallholder oil palm rejuvenation; b) there is an increase in the number of farmers who understand that the government provides financial assistance to farmers to rejuvenate and develop their oil palm farming; c) there is an increase in the number of farmers who understand that the government through BPDPKS can provide production facilities in the form of subsidized fertilizer for smallholder oil palm farmers; d) there is an increase in the number of farmers who understand that participation in cooperative institutions or farmer groups is a requirement to get government assistance in developing their oil palm farming.*

*Keywords: Farmer, Cooverative Institutions, Farmer Groups*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pengembangan usahatani kelapa sawit memiliki sejarah yang cukup panjang di Indonesia. Kelapa sawit mulai diusahakan secara komersial sejak 1911 di daerah Pulau Radja, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, namun baru sekitar tahun 2006 Indonesia sebagai produsen utama kelapa sawit dunia. Pada tahun 2009 Indonesia berhasil merebut dominasi pasar komoditi kelapa sawit dunia dari Malaysia yang sebelumnya sebagai eksportir utama.

Posisi tersebut dapat dicapai melalui pengembangan luas areal usahatani kelapa sawit. Pada era tahun 1970-an pengembangan usahatani kelapa sawit didominasi perusahaan besar, tetapi sejak 1980-an produksi kelapa sawit telah melibatkan masyarakat melalui Program Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Tahun 2017 luas areal kelapa sawit Indonesia mencapai tiga kali luas areal usahatani kelapa sawit Negara Malaysia (15 juta ha berbanding 5,3 ha), tetapi ekspor Indonesia hanya dua kali ekspor Malaysia.

Produktivitas kebun sawit Malaysia secara keseluruhan 3,96 ton CPO/ha/tahun sedangkan produktivitas perkebunan sawit Indonesia adalah 2,7 ton CPO/ha/tahun, artinya selisih produktivitas lahan sawit di Indonesia dengan Malaysia mencapai 1,26 ton/ha (Triatmojo, 2019), bahkan terjadi ketimpangan produksi yang cukup besar antara perkebunan besar (4 ton/ha/panen) dengan usahatani kelapa sawit rakyat (2 ton/ha/panen), sementara 40 % areal pertanaman kelapa sawit di Indonesia merupakan usahatani kelapa sawit rakyat mencapai 6 juta ha (Hafif, dkk, 2014).

Komoditi kelapa sawit memiliki peran penting bagi pengembangan ekonomi nasional serta perekonomian masyarakat, bahkan memiliki prospek yang cukup besar sebagai sumber minyak nabati dunia karena produktivitasnya cukup tinggi dibanding dengan sumber minyak nabati lainnya (Kemendag.go.id, 2021), sebagaimana disajikan pada Tabel 1:

Tabel 1. Sumber dan Produksi Minyak Nabati.

Sumber Minyak Nabati	Produksi Minyak (ton/ha/tahun)
Kelapa Sawit	4,27
Biji Raps	0,85
Bunga Matahari	0,52
Kedelai	0,45
Kelapa	0,34

Sumber: Kemendag.go.id, (2021).

Tingginya produktivitas kandungan minyak nabati komoditi kelapa sawit, menimbulkan persaingan dagang ditingkat dunia, sehingga negara-negara Uni Eropa melakukan kampanye negatip bahkan menolak minyak kelapa sawit dari Indonesia, dengan alasan bahwa areal pertanaman kelapa sawit di Indonesia adalah lahan yang dikonversi dari hutan tropis sehingga merusak lingkungan.

Menyikapi situasi ini, Pemerintah Indonesia menerapkan moratorium pembukaan lahan baru untuk areal pertanaman kelapa sawit selama tiga tahun, sejak 19 September 2018. Peningkatan produksi hanya dapat dicapai melalui peningkatan produktivitas, terutama kelapa sawit rakyat yang masih sangat potensial untuk ditingkatkan. Peningkatan produktivitas ini ditempuh melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR) dengan replanting atas areal kelapa sawit rakyat menggantikan

tanaman tidak menghasilkan (TTM) dengan bibit tanaman baru yang unggul dan berproduksi tinggi.

Program peremajaan sawit rakyat (PSR) merupakan program untuk membantu pekebun rakyat memperbaharui perkebunan kelapa sawit mereka melalui pengembangan usahatani kelapa sawit yang berkelanjutan dan berkualitas, dan mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal. Melalui PSR, produktivitas lahan milik pekebun rakyat bisa ditingkatkan tanpa melalui pembukaan lahan baru. Peremajaan kebun kelapa sawit pekebun ini dilaksanakan secara bertahap di seluruh provinsi penghasil kelapa sawit di Indonesia. Produktivitas kebun kelapa sawit rakyat saat ini tergolong rendah, berkisar 2-3 ton/ha/panen, padahal perkebunan sawit di Indonesia memiliki potensi yang besar.

Rendahnya produktivitas perkebunan sawit rakyat ini antara lain disebabkan kondisi pertanaman yang sudah tua dan rusak serta sebagian menggunakan benih non-sertifikat, oleh karena itu perlu dilakukan peremajaan tanaman kelapa sawit dengan menggunakan benih unggul dan bersertifikat. Pelaksanaan PSR harus memenuhi empat unsur, yakni legal, produktivitas, Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), dan prinsip keberlanjutan. Dalam memenuhi unsur legal pekebun rakyat yang berpartisipasi dalam program ini harus mengikuti aspek legalitas tanah. Unsur produktivitas dalam program ini adalah untuk meningkatkan standar produktivitas hingga 10 ton tandan buah segar/ha/tahun dengan kepadatan tanaman <80 pohon/ha.

Unsur sertifikasi ISPO dimaksudkan untuk memastikan prinsip keberlanjutan dalam program pengembangan usahatani kelapa sawit, yakni peserta program ini difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) pada panen pertama. Prinsip keberlanjutan yang dimaksud adalah program dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan yang meliputi konservasi lahan, lingkungan, dan kelembagaan.

Pemerintah Indonesia mengejar target program PSR hingga 2021, dan bahkan sudah memberi target 540 ribu hektar lahan sawit untuk diremajakan pada tahun 2022 (Mashabi, 2021). Salah satu cara yang mereka lakukan adalah lewat kerja sama untuk peremajaan sawit rakyat melalui kemitraan. Selain itu, pemerintah juga menawarkan bantuan dana yang cukup besar bagi pekebun sawit yang ingin melakukan peremajaan (*replanting*). Syarat yang harus dipenuhi petani adalah dimana pekebun sawit harus sudah tergabung dalam koperasi atau lembaga pertanian sejenis. Dana yang ditawarkan adalah 30 juta rupiah. Pekebun harus mendapatkan sertifikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*). Sertifikasi ini diwajibkan oleh pemerintah, salah satunya sebagai jaminan bahwa perkebunan sawit tidak akan merusak lingkungan.

Adapun keuntungan yang bisa diperoleh petani yang melakukan peremajaan sawit rakyat antara lain : 1) menambah produktivitas kebun sawit milik rakyat. 2) mendukung rakyat untuk mengembangkan usaha mereka di bidang usahatani kelapa sawit. 3) sebagai program pemulihan ekonomi nasional, terutama di era pandemi. Cara ini juga dapat menyerap tenaga kerja. Selain itu, *replanting* juga dapat memperpanjang umur bisnis kelapa sawit.

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu wilayah di Sumatera Utara, sebagai sentra pengembangan kelapa sawit rakyat. Data BPS Tahun 2020, menunjukkan bahwa luas lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Deli Serdang tahun 2019 adalah 13.374,99 ha dengan produksi 38.731,83 ton (BPS, *Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka*, 2020). Penghasil usahatani kelapa sawit rakyat terbesar di

Kebupaten Deli Serdang adalah Kecamatan STM Hilir, Kecamatan Hamparan Perak dan Kecamatan STM Hulu. Mayoritas petani di Kecamatan STM Hilir menggantungkan aktivitas ekonominya dari usahatani kelapa sawit rakyat sebagai sumber penghasilan keluarga. Desa Kuta Jurung merupakan salah satu desa dari 15 desa di Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang dengan produktivitas usahatani kelapa sawit rakyat yang tergolong rendah. Rendahnya produktivitas ini disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah rendahnya modal yang dimiliki petani untuk melakukan peremajaan serta rendahnya pemahaman petani terkait pemanfaatan kelembagaan dalam memperoleh modal dan pembiayaan peremajaan sawit.

Berdasarkan Data BPS Kecamatan STM Hilir Tahun 2020, luas usahatani kelapa sawit rakyat di Kecamatan STM Hilir pada tahun 2017 adalah 2.860 ha dengan produksi 3.060, 29 ton. Luas lahan usahatani ini mengalami penurunan 1,1 % menjadi 2.827,69 ha pada tahun 2018 dengan produksi ton 8.55,42 (BPS, *Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir Dalam Angka*, 2020), oleh sebab itu perlu dilakukan penyuluhan dalam bentuk pemberian informasi dan pemahaman kepada petani kelapa sawit rakyat tentang strategi mendapatkan dana peremajaan kelapa sawit rakyat untuk pengembangan usahatani kelapa sawit rakyat secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pendapatan petani di wilayah ini.

### **Identifikasi Masalah**

Adapun permasalahan yang ditemukan melalui kegiatan pengabdian ini adalah; 1) Petani belum memanfaatkan program pendanaan peremajaan sawit rakyat yang disediakan oleh pemerintah dalam mengembangkan usahatani kelapa sawitnya; 2) Petani belum memahami peran dan manfaat kelembagaan kelompok tani sebagai wadah dan syarat untuk mendapatkan modal atau pembiayaan peremajaan kelapa sawit rakyat dari pemerintah.

### **Tujuan Pengabdian**

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk; 1) mendorong petani dalam memanfaatkan program pendanaan peremajaan sawit rakyat yang disediakan pemerintah untuk pengembangan usahatani kelapa sawit; 2) meningkatkan pemahaman petani tentang peran dan manfaat kelembagaan kelompok tani sebagai wadah dan syarat untuk mendapatkan pembiayaan dalam rangka peremajaan usahatani kelapa sawit rakyat dari pemerintah.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kelembagaan Petani**

Kelembagaan merupakan organisasi atau kaidah baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Suardi, *dkk* (2015) menyebutkan bahwa kelembagaan berperan penting dalam mengubah perilaku dan pola pikir masyarakat, yang sebagian besar berasal dari norma-norma yang dianut. Kelembagaan berpusat pada tujuan, nilai atau kebutuhan sosial utama. Lebih jauh dikatakan bahwa kelembagaan mengacu kepada suatu prosedur, kepastian, dan panduan untuk melakukan sesuatu.

Menurut Anantanyu (2011), Kelembagaan adalah keseluruhan pola-pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar seperti; kehidupan keluarga, negara, agama dan mendapatkan makanan, pakaian, dan kenikmatan serta tempat perlindungan. Kelembagaan juga mengandung pengertian,

yaitu institusi dan nilai/norma: sebuah institusi yang di dalamnya terkandung nilai/norma. Nilai dan norma yang ada dalam institusi inilah yang mengatur jalannya institusi tersebut. Sementara, agribisnis merupakan bisnis dalam sektor pertanian baik dari hulu hingga hilir yang mencakup seluruh aktivitas yang meliputi produksi, penyimpanan, pemasaran, prosesing bahan dasar dari usaha tani, serta suplay input dan penyediaan pelayanan penyuluhan, penelitian, dan kebijakan.

Kelembagaan agribisnis adalah institusi yang terkait dengan agribisnis atau bisnis pertanian yang di dalam institusi tersebut terdapat nilai-nilai dan norma yang mengaturnya (Tedjaningsih, dkk, 2018). Dalam agribisnis lahan kering berbasis perkebunan terdapat berbagai kelembagaan di antaranya kelembagaan sarana produksi, kelembagaan pemasaran, dan kelembagaan penyuluhan. Peran kelembagaan petani dalam mendukung keberlanjutan pertanian sangat diperlukan untuk memberikan masukan dan pertimbangan bagi pelaku pembangunan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal (Noviatirida, 2011). Dalam melakukan usaha taninya petani mempunyai hubungan kerja dengan lembaga-lembaga pendukungnya, seperti kelompok tani, pedagang saprodi, pedagang hasil pertanian, penyuluh, koperasi, bank, dan pemerintah daerah (Cahyono & Tjokropandojo, 2012).

### **Peran Kelompok Tani**

Melihat tingginya potensi usahatani perkebunan kelapa sawit pada beberapa daerah khususnya di Propinsi Sumatra Utara, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan produksi dan kualitas tandan buah segar (TBS) usahatani tersebut. Keberadaan kelompok tani dapat menjadi wadah yang baik bagi petani untuk dapat membantu mereka dalam meningkatkan jumlah produksi dan kualitas buah sawit yang dihasilkan masyarakat, dengan demikian dibutuhkan peran pemerintah untuk membentuk kelompok tani tersebut.

Melalui kelompok tani, proses pelaksanaan kegiatan dapat melibatkan anggota kelompok dalam berbagai kegiatan secara bersama. Pembentukan dan pembinaan kelompok tani perlu dilakukan secara berkesinambungan dan diarahkan pada perubahan pola pikir petani dalam menerapkan sistem agribisnis. Pembentukan kelompok tani itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan petani mandiri yang berperan sebagai objek dalam pembangunan pertanian. Kelembagaan petani mempunyai fungsi sebagai wadah proses pembelajaran, wahana kerja sama, unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran, serta unit jasa penunjang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 67/Permentan/SM 050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Kelembagaan petani pada prinsipnya dapat ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. Kelembagaan petani berdasarkan Permentan tersebut terdiri dari: Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional.

Bayu, dkk (2016) menyampaikan peran kelompok tani dapat sebagai kelas belajar untuk menumbuhkan motivasi petani dalam pengembangan usahatani sawit rakyat. Melalui kelompok tani, proses pelaksanaan kegiatan melibatkan anggota kelompok dalam berbagai kegiatan bersama. Pembentukan dan pembinaan kelompok tani perlu dilakukan secara berkesinambungan dan diarahkan pada perubahan pola pikir petani dalam menerapkan sistem agribisnis. Pembentukan kelompok tani itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan petani mandiri yang berperan sebagai objek dalam pembangunan pertanian.



Kelompok tani sebagai lembaga media kerjasama merupakan wadah dan sarana dalam membangun relasi untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan usahatani yang dijalankan anggotanya. Selain itu, untuk menjalankan perannya sebagai wahana kerjasama bagi anggota kelompok, pengurus kelompok harus mampu memperkuat, memperlancar dan sekaligus mendorong terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan, baik antar anggota maupun dengan pihak lain.

## **METODE PENGABDIAN**

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2020, di Desa Kuta Jurung Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diikuti sebanyak 20 orang petani kelapa sawit rakyat sebagai partisipan.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah kegiatan ceramah/ penyuluhan (Djuwendah et al., 2021) dengan metode sebagai berikut; a) metode sosialisasi; b) Diskusi yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman petani terkait dengan materi yang disampaikan narasumber; c) Evaluasi, untuk mengukur pemahaman peserta terkait materi yang disampaikan pada saat kegiatan pengabdian dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat**

Prospek kelapa sawit Indonesia akan semakin baik, karena produksi tidak lagi terutama ditujukan untuk ekspor setelah kebutuhan untuk industri domestik (terutama minyak goreng) terpenuhi. Kebijakan bio solar yang secara kontinu menaikkan proporsi minyak nabati (sawit) dari 20 %, 30 %, 40 % dan 70 % akan meningkatkan permintaan CPO di dalam negeri untuk diproses menjadi bahan bakar minyak (BBM). Hal ini akan mengakibatkan harga CPO dan selanjutnya harga TBS akan relatif lebih stabil karena tidak tergantung sepenuhnya kepada fluktuasi harga dunia.

Untuk membiayai peremajaan sawit rakyat, melalui Perpres No. 61 tahun 2015, Indonesia membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kepala Sawit yang dihipung dari ekspor CPO. Dengan demikian dana yang dikelola BPDP bukan berasal dari APBN melainkan hasil swadaya masyarakat kelapa sawit. Sejauh ini, dana yang sudah terhimpun sebesar 35 triliun rupiah, tetapi dana yang tersalurkan baru 10 % yang terutama untuk peremajaan sawit rakyat. Penggunaan dana BPDP meliputi; stabilitas dan pengembangan pasar sawit, peremajaan tanaman, sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan pendidikan, penelitian dan pengembangan, promosi dan advokasi. Program utama adalah peremajaan perkebunan rakyat dan pembangunan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan petani kecil. Untuk memanfaatkan hibah BPDP Kelapa Sawit, pekebun harus membentuk wadah kelompok tani atau koperasi kelapa sawit (syarat kelembagaan) dan legalitas lahan petani, hal tersebut menjadi salah satu topik paparan pada kegiatan pengabdian yang dilakukan, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Pemaparan materi penyuluhan kepada petani kelapa sawit rakyat di Kantor Desa Kuta Jurung, Kecamatan STM Hilir.

### **Kelembagaan Petani Kelapa Sawit**

Petani perlu membentuk kelompok tani kelapa sawit, agar dapat memanfaatkan harga yang semakin baik, disamping sebagai syarat kelembagaan untuk mendapatkan bantuan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Petani berhak mendapatkan bantuan biaya peremajaan kelapa sawit sebesar Rp 30 juta per ha. Kedepan, program BPDPKS akan bergeser dari program peremajaan sawit rakyat (PSR) menjadi sarana produksi yaitu penyediaan pupuk bersubsidi bagi pengembangan usahatani kelapa sawit rakyat

Bagi petani kelapa sawit dianjurkan untuk membentuk kelompok tani karena prosedurnya lebih mudah (akte notaris). Berbeda dengan koperasi yang selain akte notaris, membutuhkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Selain itu, koperasi mempersyaratkan adanya rapat anggota tahunan (RAT) yang dipantau langsung oleh Dinas Koperasi tingkat kabupaten/ kota. Kelompok tani yang tidak bergerak dalam bidang komersial tidak terlalu membutuhkan RAT yang pada umumnya memutuskan sisa hasil usaha (SHU) ditahan dan dibagi, hal tersebut menjadi salah satu topik diskusi, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Kegiatan diskusi pada saat kegiatan penyuluhan terkait pendanaan peremajaan kelapa sawit rakyat.

Mengingat petani kelapa sawit pada umumnya mengelola juga kegiatan pertanian lainnya (terutama pangan), maka keterlibatan dalam kelompok tani atau koperasi pertanian sangat dianjurkan untuk dapat memanfaatkan program-program

pembinaan/penyuluhan dan program lainnya yang dijalankan oleh pemerintah melalui dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dari pos anggaran ketahanan pangan. Dengan demikian kelembagaan petani kelapa sawit lebih baik dipisahkan dari kelembagaan petani, meskipun kenggotaannya hampir identik. Karena sumber pendanaan dan kegiatan/program kedua kelompok ini sama sekali berbeda, masing masing olahan yaitu Rp 1.644, Rp 153.375 dan Rp 82.443.

### Evaluasi

Pada kegiatan pengabdian ini dilakukan evaluasi kepada petani kelapa sawit rakyat terkait dengan pemanfaatan program pendanaan peremajaan kelapa sawit rakyat dan manfaat kelembagaan kelompok tani sebagai wadah untuk untuk mendapatkan pembiayaan peremajaan kelapa sawit rakyat dari pemerintah. Proses evaluasi yang dilakukan adalah para petani diminta untuk mengisi dan menjawab pertanyaan singkat sebelum (pre tes) dan setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian (post tes), sebagaimana terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Petani sedang mengikuti evaluasi yaitu post tes yang dipandu Mahasiwa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian

Berdasarkan kegiatan pengabdian dan sesuai dengan hasil evaluasi, bahwa terdapat peningkatan pemahaman petani terkait dengan pemanfaatan program pendanaan peremajaan kelapa sawit rakyat sesuai dengan program pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) serta manfaat kelembagaan kelompok tani sebagai wadah untuk untuk mendapatkan pembiayaan peremajaan kelapa sawit rakyat dari pemerintah, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.



Tabel 1. Pemahaman petani terkait dengan pemanfaatan program pendanaan peremajaan kelapa sawit dan manfaat kelembagaan sebagai wadah untuk mendapatkan modal dari pemerintah.

No	Deskripsi	Pre test				Post test			
		Ya	%	tidak	%	Ya	%	tidak	%
1	Apakah bapak/ibu tahu bahwa pemerintah memiliki program peremajaan perkebunan kelapa sawit ?	10	50%	10	50%	17	85%	3	15%
2	Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa pemerintah memiliki bantuan dana yang diberikan kepada petani untuk meremajakan dan mengembangkan usahatani kelapa sawitnya ?	11	55%	9	45%	18	90%	2	10%
3	Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa kedepan, pemerintah melalui BPDPKS akan memberikan sarana produksi berupa pemberian pupuk bersubsidi bagi petani kelapa sawit rakyat ?	5	25%	15	75%	16	80%	4	20%
4	Apakah bapak/ibu paham bahwa keikutsertaan dalam kelambagaan koperasi atau kelompok tani merupakan persyaratan dalam mendapatkan bantuan dana dari pemerintah ?	8	40%	12	60%	19	95%	1	5%

Sumber : Data primer, diolah 2021

Berdasarkan Tabel 1 dapat diperhatikan setelah pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilakukan evaluasi kepada petani yang mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut. Hasil evaluasi menunjukkan terjadi peningkatan jumlah petani partisipan yang paham bahwa pemerintah memiliki program peremajaan kelapa sawit rakyat dari 10 partisipan (40%) meningkat menjadi 17 (85%).

Jumlah petani yang memahami bahwa pemerintah memiliki bantuan dana yang diberikan kepada petani untuk meremajakan dan mengembangkan usahatani kelapa sawitnya meningkat dari 11 partisipan (55%) menjadi 18 (90%). Serta terjadi peningkatan jumlah petani yang paham bahwa pemerintah melalui BPDPKS akan memberikan sarana produksi berupa pupuk bersubsidi bagi petani kelapa sawit rakyat dari 5 orang partisipan (25%) menjadi 16 orang partisipan (80%).

Tabel 1, juga menunjukkan terjadi peningkatan jumlah petani yang paham bahwa keikutsertaan dalam kelambagaan koperasi atau kelompok tani merupakan persyaratan dalam mendapatkan bantuan dana dari pemerintah dari 8 partisipan (40%) meningkat menjadi 19 partisipan (95%).

Hasil kegiatan pengabdian ini, sejalan dengan hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan Rosidin, dkk (2020) bahwa pelaksanaan bimtek dapat meningkatkan pemahaman peserta secara menyeluruh baik secara teori maupun praktik. Kegiatan penyuluhan dan bimtek tentu akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas dan kinerja terukur melalui sistem yang dibangun.

Pengetahuan petani terkait dengan pemanfaatan program pendanaan peremajaan kelapa sawit dan manfaat kelembagaan sebagai wadah untuk mendapatkan modal dari pemerintah masih tergolong rendah. Pengetahuan akan muncul setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu obyek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia seperti; indra penglihatan, pendengaran, dan sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Proses penyuluhan yang dilakukan adalah salah satu metode untuk meningkatkan pengetahuan petani, khususnya terkait dengan peremajaan usahatani kelapa sawit rakyat.

Pengetahuan berperan besar dalam memberikan wawasan terhadap pembentukan sikap masyarakat. Sikap tersebut akan diikuti dengan tindakan dalam melakukan usaha-usaha peningkatan kemampuan (Notoatmodjo, 2010). Faktor lain yang berpengaruh pada pengetahuan seseorang dapat berasal dari pengalaman, hubungan sosial, paparan media masa seperti majalah, televisi, dan buku (Notoatmodjo, 2012), namun intinya adalah informasi dan pendidikan akan sangat berperan dalam meningkatkan pengetahuan seseorang (Mubarak, 2011).

## KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian dan evaluasi yang dilaksanakan dapat disimpulkan; a) terjadi peningkatan jumlah petani partisipan yang memahami program pemerintah tentang peremajaan kelapa sawit rakyat dari 40% meningkat 85%; b) terjadi peningkatan jumlah petani yang memahami bahwa pemerintah memiliki bantuan dana yang diberikan kepada petani untuk meremajakan dan mengembangkan usahatani kelapa sawitnya dari 55% menjadi 90%; c) terjadi peningkatan jumlah petani yang paham bahwa pemerintah melalui BPDPKS akan memberikan sarana produksi berupa pupuk bersubsidi bagi petani kelapa sawit rakyat dari 25% menjadi 80%; d) terjadi peningkatan jumlah petani yang memahami bahwa keikutsertaan dalam kelembagaan koperasi atau kelompok tani merupakan persyaratan untuk mendapatkan bantuan pemerintah dari 40% meningkat 95%.

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan disarankan; a) agar masyarakat petani kelapa sawit rakyat untuk dapat memanfaatkan harga yang semakin baik, petani kelapa sawit perlu membentuk kelompok tani sebagai syarat kelembagaan untuk mendapatkan bantuan dari BPD-PKS mengingat pembentukan lembaga kelompok tani prosedurnya lebih mudah dari pada lembaga koperasi, b) sebaiknya kelembagaan petani kelapa sawit dipisahkan dari kelembagaan petani, karena sumber pendanaan dan kegiatan atau program pada kedua kelompok ini berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anantanyu, S. 2011. Kelembagaan Petani: Peran dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian (SEPA)*, 7 (2). Solo: Universitas Sebelas Maret.
- Bayu P, dkk. 2016. Peran Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Swadaya Kelapa Sawit Di Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Riau*.
- BPS. 2020. *Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka (Deli Serdang Regency in Figure)*. Lubuk Pakam: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2020.
- BPS. 2002. *Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir Dalam Angka*. Badan Pusat

- Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2020.
- Cahyono, S., & Tjokropandojo, D.S. 2012. Peran Kelembagaan Petani dalam Mendukung Keberlanjutan Pertanian sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Lokal. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK*, 2 (1):15-23.
- Djuwendah, E., Karyani, T., Saidah, Z., & Hasbiansyah, O. 2021. Pelatihan Budidaya Sayuran Secara Vertikultur di Pekarangan Guna Ketahanan Pangan Rumah Tangga. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat - Dinamisia*. 5(2): 1-7. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i2.5291>
- Hafif, B., Ernawati, R.R., & Pujiarti, Y. 2014. Peluang Peningkatan Pproduktivitas Kelapa Sawit Rakyat di Provinsi Lampung (Opportunities for Increasing the Productivity of Smallholders Oil Palm In Lampung Province. *Jurnal Littri*. 20(2): 100- 108. ISSN 0853-8212.
- Kemendag.go.id. 2021. Profil Komoditas Minyak Goreng. [https://ews.kemendag.go.id/sp2kplanding/assets/pdf/120116 ANK PKM DS K Minyak.pdf](https://ews.kemendag.go.id/sp2kplanding/assets/pdf/120116_ANK_PKM_DS_K_Minyak.pdf). Diakses, 15 September 2021.
- Mashabi, S. 2021. *Hingga 2022 Pemerintah Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat di Lahan 540.000 Hektar*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/02/16381511/hingga-2022-pemerintah-targetkan-peremajaan-sawit-rakyat-di-lahan-540000>. Diakses, 15 September 2021.
- Mubarak, W. I. 2011. *Promosi kesehatan*. Jogyakarta : Graha ilmu.
- Nasrul, W. 2012. Pengembangan Kelembagaan Pertanian Untuk Peningkatan Kapasitas Petani Terhadap Pembangunan Pertanian. *Jrnal Menara Ilmu*. 3 (29). <http://blog.ub.ac.id/dykaw/files/2013/09/PENGEMBANGAN-KELEMBAGAAN-PERTANIAN.pdf>.
- Notoatmodjo. 2010. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Notoatmodjo, S. 2012. *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Noviatirida, W. 2011. Analisis Bentuk Kerja Sama Petani dengan Lembaga-Lembaga Pendukung Pengembangan Agribisnis Kakao di Kenagarian Sekukur, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman. Skripsi. Fakultas Pertanian, Universitas Andalas Padang. Padang.
- Rosidin, U., Maulina, D., & Kadaritna, N. 2020. Peningkatan Kompetensi Pedagogik Dosen Melalui Penyusunan Soal *Hight Order Thingking Skills*. *Aksiologi*: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. 4 (2); 181-189.
- Suardi, I. D.P.O., Darmawan, D.P., Sarjana, I. D. G. R. 2015. Potensi Dan Peran Kelembagaan Pertanian DalamPerlindungan Lahan Pertanian Pangan DiProvinsi Bali. Makalah pada Seminar Nasional Sains dan Teknologi (Senastek), Denpasar Bali 2015.
- Sukino. 2013. *Pembangunan Pertanian dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Tedjaningsih, T., Suyudi,& Nuryaman, H. 2018. Peran Kelembagaan Dalam Pengembangan Agribisnis Mendong (Institutional Role In The Development of Mendong Agribusiness). *MIMBAR AGRIBISNIS-Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*. 4(2): 210-226.
- Triatmojo, A. 2019. *Produktivitas Lahan Sawit Indonesia dan Malaysia: Perbandingan Dan Faktor Utama yang Perlu Diselesaikan*. Koaksi Indonesia. <https://coaction.id/produktivitas-lahan-sawit-indonesia-dan-malaysia-perbandingan-dan-faktor-utama-yang-perlu-diselesaikan/>. Diakses, 15 September 2021.